ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA (STUDI KASUS: 5 PROVINSI DENGAN IPM TERENDAH)

TUGAS AKHIR

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

FRITZ COLYN LUMBAN RAJA

B1011211079

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Fritz Colyn Lumban Raja
NIM	:	B1011211079
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir	:	Analisis Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia (Studi Kasus: 5 Provinsi dengan IPM Terendah).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 07 Juli 2025



Fritz Colyn Lumban Raja
NIM. B1011211079

PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama	:	Fritz Colyn Lumban Raja
NIM	:	B1011211079
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir	:	Analisis Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia (Studi Kasus: 5 Provinsi dengan IPM Terendah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 07 Juli 2025



Fritz Colyn Lumban Raja
NIM. B1011211079

LEMBAR YURIDIS

Analisis Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia (Studi Kasus: 5 Provinsi dengan IPM Terendah

Penanggung Jawab Yuridis

Fritz Colyn Lumban Raja
B1011211079

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA) : 25 Juni 2025

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1.	Pembimbing Utama	Eko Supriyanto, S.E., M.E. NIP. 199101212019031013	07/07/25	
2.	Ketua Penguji	Yanto, S.E., M.Sc. NIP. 197706152003121004	07/07/25	
3.	Anggota Penguji	Romi Suradi, S.E.I., M.E NIP. 198610022019031004	02/07/25	

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)

Pontianak, 07 JUL 2025
Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan

Yanto, S.E., M.Sc.
NIP. 197706152003121004

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat dan berkat-Nya penulisan Tugas Akhir yang berjudul "**ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA (STUDI KASUS: 5 PROVINSI DENGAN IPM TERENDAH)**" dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan penulisan ini merupakan syarat akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari keterlibatan banyak pihak yang membantu serta memberikan saran dan masukan. Dalam kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Yanto, SE, M.Sc. selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak Eko Supriyanto, S.E., M.E. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, saran, pemikiran, bimbingan, semangat dan dorongan kepada penulis sehingga penulisan tugas akhir ini dapat berjalan lancar dan terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Yanto, SE, M.Sc. selaku dosen penguji pertama yang telah memberikan perbaikan, arahan, saran dan kritik yang membangun dalam penulisan tugas akhir ini.
6. Bapak Romi Suradi, S.E.I., M.E. selaku dosen penguji kedua yang juga telah memberikan perbaikan, arahan, saran dan kritik yang membangun dalam penulisan tugas akhir ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang memberikan banyak ilmunya kepada penulis terkhusus Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
8. Seluruh Staf Akademik, Perpustakaan, dan Tata Usaha serta seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis serta telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa/i.

9. Kedua orang tua penulis, yakni Bapak Kostan Lumban Raja dan Ibu Asni Sitio yang telah mendidik dan mengayomi hidup penulis. Terima kasih banyak atas segala doa, cinta, kasih sayang dan dukungan serta pengorbanan yang selalu diberikan dengan tulus kepada anak-anaknya.
10. Kelima saudara penulis, Bang Ferdinan, Bang Gon, Bang Tino dan Kak Ciga serta adek Fetro yang selalu mendukung dan memberi semangat dalam menyelesaikan tugas akhir penulis.
11. Seluruh keluarga-keluarga yang ada di Kalimantan Barat terima kasih atas segala bantuan dan dukungan serta bimbingan yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
12. Keluarga HIMEPA (Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan), terima kasih atas pembelajaran mengenai nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan serta atas segala pengalaman dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih banyak terkhususnya pengurus HIMEPA angkatan 2021 karena sudah menjadi sahabat dalam suka dan duka, selalu memberikan dukungan, serta saling bahu-membahu dalam setiap keadaan.
13. Keluarga EDC (*Economic Debate Club*) 2022/2023, terima kasih atas pengalaman organisasi yang berharga serta berbagai pengetahuan dan ilmu yang sangat bermanfaat selama perkuliahan dan organisasi.
14. Keluarga DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa) 2022/2023, terima kasih atas segala pengalaman dan pengetahuan yang telah diberikan, serta atas kesediaan menjadi teman dalam berdiskusi dan bertukar pikiran.
15. Rekan-rekan tim olahraga dan teman kumpul NEKAD, terima kasih atas segala kebersamaan, keseruan dan semangat sportivitas yang selalu menjadi tempat penulis untuk melampiaskan penat dan lelah.
16. Seluruh mahasiswa Ekonomi Pembangunan angkatan 2021 yang menjadi teman seperjuangan. Terima kasih atas kebersamaan yang terjalin dan semangat bersama dalam mewujudkan harapan. Semoga langkah kita ke depan selalu diberkahi dengan keberhasilan
17. Terakhir penulis ingin berterima kasih kepada diri sendiri yang telah mampu berjuang selama perkulihaan. Terima kasih untuk setiap usaha, ketekunan, dan dedikasi yang telah diberikan dalam menyelesaikan studi ini. Semoga tulisan ini tidak hanya menjadi pencapaian akademik semata, tetapi juga dapat memberikan kontribusi keilmuan yang

bermanfaat bagi pembaca dan menjadi sumber keberkahan yang berkelanjutan bagi penulis dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Semoga pengalaman ini menjadi fondasi yang kuat untuk terus berkembang dan memberikan dampak positif di masa depan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan dapat pula dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. Kritik serta saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dengan tujuan tugas akhir ini menjadi tulisan yang baik.

Pontianak, 07 Juli 2025



Fritz Colyn Lumban Raja
NIM. B1011211079

ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA (STUDI KASUS: 5 PROVINSI DENGAN IPM TERENDAH)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks Pembangunan manusia di 5 provinsi dengan IPM terendah di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Dengan menggunakan data sekunder diperoleh dari tahun 2014-2023 di lima provinsi Indonesia yang bersumber dari Badan Pusat Statistika dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan time series dan cross secation. Analisis data menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan berpengaruh positif tidak singinifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 5 provinsi dengan IPM terendah.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia; Tingkat Kemiskinan ; Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan; Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan.

ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA (STUDI KASUS: 5 PROVINSI DENGAN IPM TERENDAH)

RINGKASAN

Latar Belakang

Konsep Pembangunan Manusia menyoroti pentingnya manusia sebagai fokus utama dalam berbagai proses pembangunan ekonomi. Dalam era globalisasi dan persaingan bebas, kualitas sumber daya manusia memegang peranan vital sebagai kunci keberhasilan pembangunan suatu negara. Menurut *United Nations Development Program* (UNDP) menyatakan bahwa fokus pembangunan sebaiknya diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia. Konsep pembangunan ini dapat dipahami sebagai suatu rangkaian proses yang memiliki tujuan untuk memperluas opsi-opsi yang tersedia bagi manusia. Meskipun secara nasional IPM Indonesia menunjukkan tren peningkatan, masih terdapat lima provinsi dengan IPM terendah, yaitu Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Barat. Kesenjangan ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan, serta belum meratanya akses terhadap layanan dasar. Dikarenakan apabila disuatu wilayah memiliki tingkat kemiskinan yang masih tinggi atau pendapatan yang masih kurang, serta pengeluaran pemerintah yang belum efektif maka indeks pembangunan manusia masih menjadi suatu permasalahan. pendidikan memegang peranan penting dalam memperkuat kemampuan negara-negara berkembang untuk mengadopsi teknologi terkini serta membangun kapasitas yang mendukung pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, kesehatan yang prima menjadi syarat utama guna meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia, sehingga keberhasilan pendidikan juga sangat bergantung pada kondisi kesehatan yang optimal. Alokasi anggaran kesehatan yang memadai memungkinkan pembangunan infrastruktur kesehatan yang lebih baik, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas, penurunan angka kematian, dan peningkatan harapan hidup.

Permasalahan

Permasalahan dalam pembangunan manusia di lima provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di Indonesia adalah masih tingginya tingkat kemiskinan yang berdampak langsung pada rendahnya kualitas hidup masyarakat. Selain itu, terdapat ketimpangan pembangunan manusia antarwilayah, terutama di Indonesia Timur, yang menyebabkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masih belum merata. Permasalahan ini semakin kompleks dengan adanya temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan inkonsistensi pengaruh antara tingkat kemiskinan dan pengeluaran pemerintah terhadap IPM, sehingga strategi pembangunan yang diterapkan sering kali belum tepat sasaran. Akibatnya, meskipun terjadi peningkatan IPM selama beberapa tahun terakhir, laju

peningkatannya masih lambat dan belum cukup untuk mengangkat provinsi-provinsi tersebut dari kategori sedang ke kategori tinggi.

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 5 Provinsi di Indonesia 2014-2023.
2. Menganalisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 5 Provinsi Terendah Indonesia 2014-2023.
3. Menganalisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 5 Provinsi Terendah Indonesia 2014-2023.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian ini di 5 provinsi Indonesia dengan IPM terendah. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder dari tahun 2014-2023 yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Metode yang digunakan untuk menganalisis data yaitu analisis berupa regresi linier berganda melalui pengolahan data pada aplikasi *Eviews* 12. Uji data ini menggunakan taraf signifikansi 5% atau 0,05. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan untuk variabel independen yaitu Tingkat Kemiskinan, Penegluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan.

Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, dan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di lima provinsi dengan IPM terendah di Indonesia selama periode 2014-2023. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Artinya, semakin tinggi tingkat kemiskinan di suatu provinsi, semakin rendah pula nilai IPM-nya. Temuan ini menguatkan bahwa kemiskinan menjadi faktor utama penghambat peningkatan kualitas hidup masyarakat di provinsi-provinsi tersebut. Sementara itu, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan menunjukkan pengaruh positif terhadap IPM, namun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Hal ini berarti peningkatan alokasi anggaran pemerintah pada kedua sektor tersebut belum secara langsung mampu meningkatkan IPM secara nyata di lima provinsi yang diteliti. Beberapa kemungkinan penyebabnya antara lain efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang masih rendah, adanya alokasi anggaran yang lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai daripada program peningkatan kualitas layanan, serta tantangan geografis dan sosial yang dihadapi oleh provinsi-provinsi tersebut.

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di lima provinsi dengan IPM terendah di Indonesia. Artinya, semakin tinggi tingkat kemiskinan di suatu provinsi, semakin

rendah pula nilai IPM di wilayah tersebut. Sementara itu, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan sektor kesehatan menunjukkan pengaruh positif terhadap IPM, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan anggaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan saja belum cukup mampu mendorong peningkatan IPM secara nyata jika tidak diiringi dengan efektivitas dan pemerataan program.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar pemerintah daerah dan pusat lebih fokus pada upaya penanggulangan kemiskinan secara komprehensif, terutama di provinsi-provinsi dengan IPM terendah. Program pengentasan kemiskinan perlu diintegrasikan dengan peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan serta layanan kesehatan. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa alokasi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan benar-benar digunakan secara efektif dan tepat sasaran, bukan hanya untuk belanja rutin, tetapi juga untuk program-program yang langsung berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran juga harus ditingkatkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan mampu mendorong peningkatan IPM secara berkelanjutan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT i
PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR ii
LEMBAR YURIDIS iii
UCAPAN TERIMA KASIH iv
ABSTRAK vii
RINGKASAN viii
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii

BAB 1 PENDAHULUAN 2
BAB 2 KAJIAN LITERATUR 7
2.1 PENGARUH TINGKAT KEMISKIAN TERHADAP IPM 8
2.2 PENGARUH PENGELUARAN PEMENTAH SEKTOR PENDIDIKAN TERHADAP IPM 8
2.3 PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR KESEHATAN TERHADAP IPM 9
2.4 KERANGKA KONSEPTUAL 9
2.5 HIPOTESIS PENELITIAN 10
BAB 3 METODE PENELITIAN 10
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 14
4.1 HASIL PENELITIAN 14
4.2 PEMBAHASAN 16
BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 20
5.1 KESIMPULAN 20
5.2 REKOMENDASI 20

DAFTAR RUJUKAN 21
LAMPIRAN 24

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tingkat IPM di 5 Provinsi Indonesia 2014-2023 (Poin) 3
Tabel 1. 2 Persentase Tingkat Kemiskinan di 5 Provinsi Indonesia 2014-2023 (Persen) 4
Tabel 1. 3 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan di 5 Provinsi Indonesia 2014-2023 (Juta Rupiah) 5
Tabel 1. 4 Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan di 5 Provinsi Indonesia 2014-2023 (Juta Rupiah) 6
Tabel 3. 1 Tabel Defenisi Operasional 10
Tabel 4. 1 Hasil Uji Normalitas 14
Tabel 4. 2 Hasil Uji Multikolinearitas 14
Tabel 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 14
Tabel 4. 4 Hasil Uji Pemilihan Model 14
Tabel 4. 5 Hasil Uji Regresi dengan Fixed Effect Model 15
Tabel 4. 6 Hasi Uji Parsial (Uji t) 15
Tabel 4. 7 Hasil Uji Signifikansi (Uji F) 16
Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefesien Determinasi (Adjusted R^2) 16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka konseptual 9

ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA (STUDI KASUS: 5 PROVINSI DENGAN IPM TERENDAH)

[1]Fritz Colyn Lumban Raja

Universitas Tangjungpura, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to test and analyze the influence of poverty level variables, government spending on education and health on the Human Development Index in 5 provinces with the lowest HDI in Indonesia. This type of research is quantitative. Using secondary data obtained from 2014-2023 in five provinces in Indonesia sourced from the Central Statistics Agency and the Directorate General of Fiscal Balance. The type of data used is panel data, namely a combination of time series and cross-section. Data analysis uses multiple regression techniques. The results of this study indicate that the Poverty Level has a negative and significant effect on the Human Development Index (HDI), while Government Expenditure on the Education Sector and Government Expenditure on the Health Sector have a positive but not significant effect on the Human Development Index in 5 provinces with the lowest HDI.

Keywords: *Human Development Index; Poverty Level; Government Expenditure on the Education Sector; Government Expenditure on the Health Sector.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks Pembangunan manusia di 5 provinsi dengan IPM terendah di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Dengan menggunakan data sekunder diperoleh dari tahun 2014-2023 di lima provinsi Indonesia yang bersumber dari Badan Pusat Statistika dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan time series dan cross secation. Analisis data menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan berpengaruh positif tidak singinifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 5 provinsi dengan IPM terendah.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia; Tingkat Kemiskinan ; Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan; Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan.

[1]b1011211079@student.untan.ac.id

1. PENDAHULUAN

Konsep Pembangunan Manusia menyoroti pentingnya manusia sebagai fokus utama dalam berbagai proses pembangunan ekonomi. Hal ini menekankan pada upaya untuk meningkatkan kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Menurut Todaro & Smith (2014) proses pembangunan yang sedang berlangsung diharapkan dapat diiringi dengan pendistibusian secara merata, sehingga setiap orang dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan mendorong tercapainya kesejahteraan yang bersifat universal. Menurut *United Nations Development Program* (UNDP) menyatakan bahwa fokus pembangunan sebaiknya diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia. Konsep pembangunan ini dapat dipahami sebagai suatu rangkaian proses yang memiliki tujuan untuk memperluas opsi-opsi yang tersedia bagi manusia. Dasar pemikiran ini berangkat dari keyakinan bahwa jika setiap kualitas sumber daya manusia meningkat, maka secara alamiah akan membuka beragam kesempatan.

Pembangunan nasional sejatinya adalah upaya untuk membangun manusia Indonesia secara menyeluruh dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dalam konteks internasional, peran manusia senantiasa menjadi fokus utama dalam setiap program untuk mencapai tujuan pembangunan. Dalam era globalisasi dan persaingan bebas, kualitas sumber daya manusia memegang peranan vital sebagai inti keberhasilan pembangunan suatu negara. Indonesia yang masih sebagai negara berkembang dan memiliki penduduk terbesar keempat di dunia menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya (BAPPENAS, 2023).

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Indonesia 2045, Indonesia menghadapi tantangan dalam mentransformasi sumber daya manusia melalui beberapa tahapan. Pertama, penguatan fondasi transformasi, dengan penekanan pada peningkatan pelayanan dasar dibagian pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Kedua, mempercepat proses transformasi dengan menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan merata. Ketiga, ekspansi global, dengan penekanan pada penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan. Terakhir, perwujudan Indonesia Emas, yang menitikberatkan pada terwujudnya masyarakat Indonesia yang unggul.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengevaluasi kualitas hidup masyarakat di berbagai provinsi Indonesia. Dari 34 provinsi yang ada, hanya DKI Jakarta dan DI Yogyakarta yang mencapai kategori sangat tinggi dengan nilai IPM 82,46 dan 81,07. Kedua provinsi ini berhasil menyediakan kondisi yang mendukung peningkatan kualitas hidup warganya melalui akses pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang lebih baik dibandingkan provinsi lainnya.

Sementara itu, 24 provinsi masuk dalam kategori tinggi, menunjukkan kemajuan signifikan dalam pembangunan manusia di wilayah-wilayah tersebut meskipun tidak berada di posisi teratas. Di sisi lain, terdapat 5 provinsi yang masih berada pada kategori sedang, dengan nilai IPM terendah ada di Provinsi Papua (62,25), Papua Barat (66,66), Nusa Tenggara Timur (66,68), Sulawesi Barat (67,55) dan Kalimantan Barat (69,41). Kesenjangan itu menandakan masih timbulnya ketimpangan pembangunan manusia, khususnya dibeberapa wilayah Indonesia Timur. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus

dan strategi pembangunan yang lebih terarah dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dengan memerhatikan akses pendidikan, kesehatan, dan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat yang memadai di provinsi-provinsi tersebut.

Meskipun secara umum pembangunan manusia di Indonesia telah mencapai level yang cukup baik dengan dominasi provinsi di kategori tinggi, masih terdapat kesenjangan yang perlu diatasi, terutama untuk mengangkat provinsi-provinsi yang masih berada dalam kategori sedang menuju kategori yang lebih tinggi. Berikut ini merupakan tabel tingkat indeks pembangunan manusia di 5 provinsi dengan IPM terendah.

Tabel 1. 1 Tingkat IPM di 5 Provinsi Indonesia 2014-2023 (Poin)

Tahun	Tingkat Indeks Pembangunan Manusia				
	Nusa Tenggara Timur	Kalimantan Barat	Sulawesi Barat	Papua	Papua Barat
2014	62,26	64,89	62,24	56,75	61,28
2015	62,67	65,59	62,96	57,25	61,73
2016	63,13	65,88	63,60	58,05	62,21
2017	63,73	66,26	64,30	59,09	62,99
2018	64,39	66,98	65,10	60,06	63,74
2019	65,23	67,65	65,73	60,84	64,70
2020	65,19	67,66	66,11	60,44	65,09
2021	65,28	67,90	66,36	60,62	65,26
2022	65,90	68,63	66,92	61,39	65,89
2023	66,68	69,41	67,55	62,25	66,66
Rata-rata	64,53	67,09	65,35	59,74	64,06

Sumber: Badan Pusat Statistika (2024)

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukan bahwa IPM dengan rata-rata tertinggi terdapat di provinsi Kalimantan Barat dengan nilai Rata-rata sebesar 67,09 poin dan Provinsi Papua dengan rata-rata terendah yaitu sebesar 59,74 Poin. Secara umum, pola peningkatan IPM di lima provinsi menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan manusia, dengan peningkatan yang terjadi selama periode 2014 hingga 2023 berkisar antara 4 hingga 5 poin di masing-masing provinsi. Meskipun demikian, peningkatan yang terjadi masih belum cukup kuat untuk mengubah status dari kategori sedang menjadi kategori tinggi di provinsi tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat di suatu negara atau wilayah, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, diperlukan anggaran yang cukup. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan dukungan yang memadai dalam pelaksanaan berbagai program pendidikan agar tujuan peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan dapat tercapai dengan baik. (Andiny & Sari, 2018). Selain itu, kemiskinan yang tinggi dapat menghalangi individu membiayai kebutuhan dasar dan pembangunan manusia (Senewe et al., 2021). Dalam konteks Indonesia, yang merupakan negara dengan beragam kondisi sosial ekonomi, sangat penting untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap IPM di berbagai provinsi. Dikarenakan apabila disuatu wilayah memiliki tingkat kemiskinan yang masih tinggi atau pendapatan yang masih kurang, serta pengeluaran pemerintah yang belum efektif maka indeks pembangunan

manusia masih menjadi suatu permasalahan. Hal itu dapat mengakibatkan masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhanya.

Tingkat kemiskinan Indonesia masih menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, persentase penduduk miskin mencapai 9,36% dari total populasi, yang berarti jutaan orang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Situasi ini berdampak terhadap daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari- hari. Daya beli masyarakat yang tinggi akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, karena kemampuan beli masyarakat merupakan salah satu indikator komposit dalam pembentukan IPM yang dilihat dari segi pendapatan (Muliza et al., 2017). Hal ini menandakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan masyarakatnya. Hal ini didukung oleh penelitian dari Suhendi & Astuti (2023) bahwa dalam konteks kemiskinan, penelitian di Provinsi Papua menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, dimana setiap kenaikan 1% angka kemiskinan berdampak pada penurunan IPM sebesar 1%. Berikut ini merupakan tabel tingkat kemiskinan di 5 provinsi Indonesia.

Tabel 1. 2 Persentase Tingkat Kemiskinan di 5 Provinsi Indonesia 2014-2023 (Persen)

Tahun	Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi				
	Nusa Tenggara Timur	Kalimantan Barat	Sulawesi Barat	Papua	Papua Barat
2014	19,82	8,54	12,27	30,05	27,13
2015	22,61	8,03	12,40	28,17	25,82
2016	22,19	7,87	11,74	28,40	24,88
2017	21,85	7,88	11,30	27,62	25,10
2018	21,35	7,77	11,25	27,74	23,01
2019	21,09	7,49	11,02	27,53	22,17
2020	20,90	7,17	10,87	26,64	21,37
2021	20,99	7,15	11,29	26,86	21,84
2022	20,05	6,73	11,75	26,56	21,33
2023	19,96	6,71	11,49	26,03	20,49
Rata-Rata	21,08	7,53	11,54	27,56	23,31

Sumber: Badan Pusat Statistika (2024)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas menunjukan provinsi Papua memiliki rata-rata tingkat kemiskinan terbesar yaitu sebesar 27,56 % dan provinsi Kalimantan Barat memiliki rata-rata terkecil sebesar 7,53 %. Kalimantan Barat menunjukkan penurunan nilai secara berkelanjutan dari 8,54% pada tahun 2014 menjadi 6,71% pada tahun 2023. Sementara itu, Papua mengalami penurunan yang signifikan dari 30,05% menjadi 26,03%. Papua Barat menunjukkan penurunan yang paling mencolok, dari 27,13% menjadi 20,49% (penurunan sebesar 6,64%). Nusa Tenggara Timur menunjukkan fluktuasi dengan peningkatan pada tahun 2015 sebelum akhirnya turun ke angka 19,96% pada tahun 2023, yang hampir setara dengan posisi awalnya pada tahun 2014. Sulawesi Barat relatif stabil dengan penurunan yang moderat dari 12,27% menjadi 11,49%. Tingkat Kemiskinan dijadikan indikator untuk melihat daya konsumsi masyarakat dalam meningkatkan kesejahterhaan yaitu berupa sandang, pangan, atau kebutuhan pokok lainnya yang nantinya dapat mempegaruhi kualitas Pembangunan manusia.Selanjutnya, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia

sangat bergantung pada sektor pendidikan agar dapat sebagai penggerak kemajuan sosial dan ekonomi. Pendidikan tidak hanya memperkaya pengetahuan dan keterampilan individu, tetapi juga membentuk sikap serta meningkatkan produktivitas. Anggaran pendidikan seharusnya tidak dipandang sebagai pengeluaran biasa, melainkan sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kapabilitas masyarakat. Terdapat korelasi positif antara alokasi dana pendidikan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, di mana pertambahan anggaran pendidikan umumnya sejalan dengan perbaikan indikator pembangunan manusia. Hal ini didukung oleh penelitian dari Ani (2022) menyatakan bahwa semakin tinggi rata- rata tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat, maka akan semakin mendorong kemudahan memahami, mengaplikasikan, dan memanfaatkan kemajuan teknologi, yang pada akhirnya setiap individu usia produktif akan meningkatkan taraf ekonomi dan kualitas hidup bangsa. Berikut ini merupakan tabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan di 5 provinsi Indonesia.

Tabel 1. 3 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan di 5 Provinsi Indonesia 2014-2023 (Juta Rupiah)

Tahun	Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (Juta Rupiah)				
	Kalimantan Barat	Sulawesi Barat	Nusa Tenggara Timur	Papua	Papua Barat
2014	873.432,68	212.050,38	886.241,26	1.319.791,29	210.203,80
2015	964.495,73	261.446,91	1.103.312,74	1.570.266,72	501.665,13
2016	1.140.855,92	444.187,87	1.409.014,73	2.280.394,07	586.158,40
2017	1.760.108,40	392.845,00	2.193.271,90	1.576.520,88	763.837,35
2018	1.764.803,84	345.545,05	2.271.036,20	2.620.312,13	930.040,85
2019	2.094.661,59	441.196,22	2.720.581,39	3.361.938,67	1.005.759,43
2020	2.349.016,09	783.221,41	3.004.543,22	3.203.024,35	1.017.782,25
2021	1.486.773,51	525.451,29	2.793.969,36	1.467.638,78	772.596,94
2022	1.531.632,30	603.438,98	1.770.341,46	1.423.248,47	727.929,67
2023	1.623.819,18	625.271,13	2.018.850,98	258.424,80	480.317,69
Rata-rata	1.558.959,92	463.465,42	2.017.116,32	1.908.156,02	699.629,15

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan(2024)

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas menunjukan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan di provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar Rp. 2.017.116,32 juta, dan rata- rata terendah berada pada provinsi Sulawesi Barat dengan nilai rata-rata sebesar Rp. 463.465,42 juta. Semua provinsi mengalami fluktuasi dalam pengalokasian anggaran, dengan catatan khusus pada Papua yang mengalami penurunan signifikan akibat adanya pemekaran wilayah pada tahun 2023. Pengeluaran pemerintah yang besar dalam sektor pendidikan mampu meningkatkan mutu serta keterjangkauan layanan pendidikan, yang selanjutnya berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pendidikan berkualitas membantu meningkatkan kemampuan dan wawasan individu, yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas serta taraf hidup masyarakat.

Pendidikan memegang peranan penting dalam memperkuat kemampuan negara-negara berkembang untuk mengadopsi teknologi terkini serta membangun kapasitas yang mendukung pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, kesehatan yang prima menjadi syarat utama guna meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia, sehingga keberhasilan pendidikan juga sangat bergantung pada kondisi kesehatan yang optimal.

Alokasi anggaran kesehatan yang memadai memungkinkan pembangunan infrastruktur kesehatan yang lebih baik, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas, penurunan angka kematian, dan peningkatan harapan hidup. Penelitian menurut Ramadanisa & Triwahyuningtyas (2022) bahwa kualitas SDM yang tinggi mencerminkan derajat kesehatan seseorang yang tinggi pula sehingga akan berkontribusi pada kemajuan pembangunan manusia. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk sektor kesehatan menjadi sangat penting guna mendukung hal tersebut. Berikut ini merupakan tabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan di 5 provinsi Indonesia.

Tabel 1. 4 Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan di 5 Provinsi Indonesia 2014-2023 (Juta Rupiah)

Tahun	Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan				
	Kalimantan Barat	Sulawesi Barat	Nusa Tenggara Timur	Papua	Papua Barat
2014	320.816,71	110.333,34	202.106,08	826.879,05	112.075,85
2015	366.523,71	135.736,91	275.567,80	953.028,67	156.614,67
2016	410.073,76	188.602,61	283.797,27	1.196.631,91	206.980,20
2017	490.093,41	236.404,33	276.765,71	746.379,14	123.675,06
2018	437.538,79	174.962,90	319.038,14	818.059,28	127.010,23
2019	446.382,12	156.207,88	338.809,71	1.051.868,12	246.289,28
2020	512.293,46	187.481,64	406.204,30	967.284,33	114.043,20
2021	675.409,80	149.163,56	467.353,65	1.005.532,94	251.269,28
2022	787.334,11	134.771,96	456.211,39	597.550,72	220.197,95
2023	857.484,61	274.235,41	481.178,89	499.515,17	297.467,79
Rata-rata	530.395,05	174.790,05	350.703,29	866.272,93	185.562,35

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2024)

Berdasarkan Tabel 1.4 di atas menunjukan bahwa provinsi Papua mencatat pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dengan rata-rata tertinggi, yaitu sebesar Rp 866.272,93 juta, sementara provinsi Sulawesi Barat memiliki rata-rata pengeluaran terendah, yakni sekitar Rp 174.790,05 juta. Secara keseluruhan, pola pengeluaran cenderung meningkat di sebagian besar provinsi, namun dengan intensitas berbeda dan beberapa fluktuasi. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran prioritas anggaran kesehatan yang mungkin dipengaruhi oleh kebutuhan spesifik daerah dan kebijakan desentralisasi.

Alokasi anggaran pemerintah yang memadai di bidang kesehatan mampu meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat., menurunkan angka kematian, dan meningkatkan harapan hidup. Dengan demikian, pengeluaran kesehatan yang baik berkontribusi positif terhadap IPM.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan hasil terkait faktor-faktor yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut penelitian Apriska et al. (2024) menemukan bahwa tingginya tingkat kemiskinan berdampak negatif pada rendahnya IPM di NTB. Namun, penelitian dari Ramadanisa & Triwahyuningtyas (2022) Menunjukkan bahwa kemiskinan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM akibat penurunan kemiskinan yang tidak konsisten secara waktu dan wilayah. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam temuan mengenai pengaruh kemiskinan terhadap IPM.

Demikian pula pada pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, di Provinsi Sulawesi Utara ditemukan bahwa alokasi anggaran pendidikan yang besar efektif mendorong peningkatan IPM (Laode et al.,2020), sedangkan penelitian dari Ani (2023) menunjukkan hasil sebaliknya. Dimana kondisi ini terjadi karena sebagian besar anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah diperuntukkan bagi belanja pegawai dan pos-pos pengeluaran lainnya. Selanjutnya, menurut penelitian dari Mahulauw et al. (2017) menjelaskan dalam hal belanja kesehatan menemukan dampak positif terhadap pembangunan manusia melalui peningkatan usia hidup dan produktivitas, sementara penelitian dari Mongan (2019) menunjukan tidak menemukan pengaruh yang signifikan terhadap IPM, karena alokasi anggaran masih dominan pada aspek kuratif dibandingkan preventif. Kesenjangan temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas berbagai faktor terhadap IPM tidak hanya bergantung pada besaran atau kuantitas, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek kualitas implementasi, karakteristik wilayah, dan ketepatan program yang dijalankan.